

***Trickle-Down Economics* Arthur Lewis dan Ekonomi Pembangunan Wisata Gunung Bromo di Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun 2017-2018**

Renny Candradewi Puspitarini, Isrofiatul Anggraini

Program Studi Administrasi Negara, Universitas Panca Marga, Jawa Timur – Indonesia

Email: renny.candradewi@upm.ac.id

Diserahkan: 17 Juli 2018 | Diterima: 15 Desember 2018

Abstract

In this paper, we will examine if trickle-down effect has ever taken in rural Indonesia. One of the case draws attention in economic development study is poverty and income gap from wealthiest people to the less fortunate larger group of people. The argument goes as trickle-down effect appears to be best solution to eradicate poverty as well as to solve the income gap. Tourism has become of a strategy targeted by government to spread the trickle-down effect to the less fortunate larger group of people. Government believes by sustaining the growth on tourism would accelerate the trickle-down effect and brings less fortunate group of people to better living. In its fundamental theory, trickle-down effect has offered delusion where jobs would be created as the conditions are met. However, this paper argues that even in tourism the trickle-down effect strategy has served less for what it has promised. Through qualitative research in Ngadisari Village, a remote area, where Mount Bromo has been a tourism landmark globally, this paper finds that trickle-down effect has come with little benefit to uplift the living standard of the poor. Thus, trickle-down effect has served only as delusions of growth government has ever aspired.

Keywords: Tourism, Economy, Trickle-Down, Bromo, Humanities.

Abstrak

Tulisan ini hendak meneliti apakah efek retas ke bawah (trickle-down effect) telah terjadi di pedalaman Indonesia. Salah satu kasus paling menyerap perhatian dalam pembangunan ekonomi adalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antara sekelompok orang yang makmur dengan kelompok lebih besar orang-orang kelas menengah kebawah. Penelitian ini mempertanyakan efek retas ke bawah sebagai salah satu solusi terbaik untuk mengatasi kesenjangan pendapatan. Pariwisata telah menjadi strategi andalan pemerintah untuk mengkatalisasi efek retas ke bawah. Pemerintah percaya bahwa dengan mendorong pertumbuhan dan perkembangan di sektor pariwisata dapat mempercepat efek retas ke bawah. Dalam kerangka mendasar teorinya, efek retas ke bawah justru sedikit memberi manfaat daripada yang pernah diangan-angankan. Tulisan ini memuat temuan bahwa melalui studi kasus yang dilakukan di kawasan Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo dengan obyek wisata Gunung Bromo yang telah menjadi magnet wisatawan baik lokal dan asing membuktikan sebaliknya. Bahwa, efek retas ke bawah sedikit membawa manfaat untuk menaikkan standar hidup golongan paling miskin. Oleh karena itu, efek retas ke bawah alih-alih menjadi impian justru menciptakan angan-angan pertumbuhan semata yang pernah dimiliki oleh pemerintah.

Kata Kunci: Pariwisata, Ekonomi, Trickle-Down, Bromo, Kemanusiaan.

PENDAHULUAN

Teori pertumbuhan dua sektor menginspirasi sejumlah target kerap kali dijadikan tujuan yang pembangunan dan pertumbuhan

ekonomi. Dalam teori pertumbuhan dua sektor yang digagas Arthur Lewis pertumbuhan mungkin terjadi apabila dapat memanfaatkan peluang tenaga kerja yang melimpah di sektor pertanian untuk mendorong pertumbuhan manufaktur dan industri di perkotaan. Hal inilah yang digadang sebagai resep jitu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada negara-negara berkembang di sepanjang tahun 1980-an (Ackerman, 1982; Lehman, 2015; Niskanen; Henderson, 1992). Teori ini sempat mendulang popularitas karena pernah menjadi ikon kebijakan perekonomian di masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan pada tahun 2011 (Staff, 2011). Sebab itu, kebijakan ekonomi yang demikian akrab disebut Reaganomics. Strategi ekonomi yang menjadi intisari dari kebijakan ekonomi Reagan yakni supply-side economics atau sering dikenal dengan trickle-down economics. Trickle-down economics adalah sebutan bagi kebijakan ekonomi yang mendorong adanya pertumbuhan pada pengeluaran pemerintah, pemotongan pajak pendapatan federal, dan pajak pendapatan modal, mengurangi regulasi pemerintah yang tidak perlu serta memperketat pasokan uang guna menekan inflasi (Niskanen and Henderson, 1992). Hal ini diusung oleh pemerintah karena meyakini bahwa pasarlah yang paling mampu

menentukan apa yang terbaik untuk mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, bukannya pemerintah. Intervensi pemerintah dianggap dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi yang seimbang.

Teori pertumbuhan dua sektor Arthur Lewis menyajikan proses pertumbuhan yang berjalan vertikal. Misalnya dalam konteks destinasi wisata, banyak investor yang tertarik untuk mengembangkan destinasi wisata tertentu. Investor ini didukung oleh rendahnya pungutan pajak pendapatan modal, longgarnya regulasi yang ada lalu membangun beragam tempat hiburan, tempat menginap, tempat makan, dan lainnya sebagai paket modal yang ditanamkan di sekitar destinasi wisata (Lewis, 2013; Selowsky, 1979). Tempat hiburan, tempat makan, tempat menginap dan lainnya yang dibuka akan memberikan kesempatan kerja untuk masyarakat di sekitar. Masyarakat kemudian mengambil manfaat dari adanya destinasi wisata. Masyarakat dapat mengambil manfaatnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian seperti menjadi pelayan, karyawan hotel, karyawan di tempat hiburan dan lainnya. Potensi ini membuka peluang bagi warga lokal untuk meraup pendapatan (Sharpley and Telfer, 2002; Yoety, 2008, 1999). Pada akhirnya, tujuan pengembangan

destinasi wisata baik sebagai destinasi unggulan di daerah maupun secara nasional merupakan upaya untuk menekan angka kemiskinan.

Teori pembangunan *trickle-down economics* bukan tanpa kekurangan (Bartlett, 2009; Buchanan, 1989; Persky et al., 2004; Seip and Harper, 2016). Kekurangannya terletak pada peluang investor untuk berinvestasi pada teknologi yang justru menekan penyerapan tenaga kerja padat karya dan peluang investor untuk berinvestasi keluar sehingga memicu pelarian modal (Cutler and Katz, 1991; Todaro and Smith, 2006). Hal ini pulalah yang menjadi kritik utama teori pembangunan dua sektor Arthur Lewis sekaligus meragukan efektifitas pembangunan *trickle-down economics* (Todaro and Smith, 2006). Oleh karena itu mengapa penulis menggunakan teori *trickle-down economics*. Penulis hendak menguji sejauh mana teori ini cocok dapat digunakan dalam pendekatan ekonomi negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Penulis ingin mengetahui sejauh mana teori *trickle-down economics* diterapkan untuk membangun ekonomi lokal yang mana wilayahnya dengan destinasi wisata yang sudah terkenal di seluruh dunia.

TINJAUAN PUSTAKA

Proposisi *trickle-down economics* muncul pertama kali pada era pasca

Perang Dunia II yang mana seringkali dijadikan klaim sukses pertumbuhan ekonomi Barat pada masanya (Ackerman, 1982; Bartlett, 2009; Buchanan, 1989; Staff, 2011). Cutler dan Katz (1991) mengutarakan *Trickle-down economics* ialah proses pemutakhiran (*upgrading process*) yang pertama kali diutarakan Okun pada tahun 1973. Mengantisipasi banyak hal baru-baru ini perkembangan dalam teori pasar tenaga kerja yang tidak sempurna, Okun berpendapat pertumbuhan umum dapat menjangkau hierarki keahlian, menarik sebanyak mungkin pengangguran dan meningkatkan lapangan kerja berhadapan dengan mereka yang terjebak pada tenaga kerja murah. Setidaknya hingga tahun 1983, Cutler dan Katz (1991, 1–74) beranggapan argumen Okun dapat diterima (Persky et al., 2004, 17).

Secara ringkas *trickle-down economics* dapat ditarik dari relasi tradisional antara pertumbuhan dan kemiskinan, yang mana *trickle-down economics* dapat berjalan. Tingkat pertumbuhan tersebut dapat dinaikkan melalui intervensi publik, yang mana kebijakan juga menyediakan sarana untuk mengatasi kemiskinan dan pendapatan rendah. Strategi *trickle-down economics* biasanya bersandar pada fetisisme politis. Sementara terfokus untuk menaikkan pendapatan rata-rata keseluruhan, kebijakan pertumbuhan

menjanjikan bantuan tambahan untuk membantu mereka yang berada di posisi paling bawah dari piramida pertumbuhan.

Trickle-down economics mengandung makna bahwa pertumbuhan dengan sendirinya akan mengatasi kemiskinan yang ada dengan asumsi pertumbuhan akan mengundang surplus tenaga kerja (Arestis et al., 2007, 259). Arestis mempertanyakan apabila pertumbuhan dapat menciptakan lapangan kerja berlebih sehingga berdasarkan teori pertumbuhan dua sektor Lewis akan secara otomatis juga menciptakan permintaan tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan Arestis pada pedalaman desa di India menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Arestis meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh pertumbuhan lapangan kerja akan membuat *Trickle-down economics* berjalan. Faktanya adalah pertumbuhan tidak selalu diikuti oleh penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian *Trickle-down economics* tidak dapat berjalan apabila pertumbuhan berjalan sendiri sementara tidak dibarengi dengan penciptaan tenaga kerja.

Teori *trickle-down economics* yang dikembangkan pertama kali oleh Arthur Lewis (1954) dan diperluas oleh Ranis dan Fei (1968). Teori tersebut menjadi salah satu topik penting di dalam literatur mengenai

pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang (*Least Develop Countries/LDCs*) pada dekade 1950-an dan 1960-an. Teori *trickle down* ini menjadi populer di Amerika dalam era Presiden Reagan, tetapi pendekatan ini sebenarnya sudah lama muncul di Amerika Serikat. Aplikasi teori ini dalam bentuk *supply-side economics* oleh Presiden Reagan yang dikenal sebagai *Reaganomics* cukup berhasil menekan inflasi dan kemacetan ekonomi di Amerika Serikat. Antara lain ada dua sebab yang menjadi alasan keberhasilan *Reaganomics* itu. *Trickle-down economics* memiliki akar ide dari liberalisme klasik yang dihidupkan kembali oleh pendukungnya yakni Ronald Reagan dan Margaret Thatcher sehingga seringkali juga disebut dengan mazhab neoliberalisme. Sehingga *trickle-down economics* berkaitan erat dengan ideologi ekonomi neoliberalisme (Permadi, 2012).

Teori *trickle-down economics* menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti

oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya.

Dalam penelitian yang penulis teliti ini memang dirasa akan kurang jika tidak membandingkan peneliti-peneliti terdahulu sebagai bahan perbandingan untuk penelitian ini selanjutnya. Berikut nama-nama peneliti dapat ditemukan dalam membandingkan hasil penelitian saat ini. Perbandingan penelitian yang pertama adalah Kurniawan (2015) dan yang kedua adalah Santoso (2014). Penelitian Pendekatan *trickle-down economics* Arthur Lewis pada Pariwisata: studi ekonomi pembangunan pada Destinasi Wisata Gunung Bromo di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun 2017-2018 perlu dilakukan mengingat minimnya penelitian-penelitian seputar topik yang sama.

Kurniawan (2015) dan Santoso (2014) hanya menerangkan dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan dari pembangunan objek pariwisata di Umbul Sidomukti dan *Songa Rafting*. Rusdin (2016) hanya menjelaskan

dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pengembangan pariwisata tanpa menjelaskan bagaimana teori pertumbuhan ekonomi bermanfaat untuk memberi jawaban yang komprehensif. Kesimpulannya, penelitian terdahulu di atas dilakukan dengan menggunakan secara deskriptif ini fokus pada dampak dan belum mengisi kekosongan kaitan pariwisata dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, penulis hendak menguji sejauh mana teori *trickle-down economics* dapat memberi jawaban suatu negara berkembang dapat membangun daerahnya yang tertinggal. Penulis ingin mengetahui sejauh mana teori *trickle-down economics* dapat menjanjikan pembangunan ekonomi lokal.

Posisi penelitian ini, menggunakan pendekatan *trickle-down economics* menjelaskan bahwa kemajuan yang diusung oleh sektor swasta pada gilirannya otomatis merembes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya.

Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih

dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya. Dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi. Melalui pendekatan ini, maka diharapkan dapat mengetahui bagaimana masyarakat di sekitar destinasi wisata Gunung Bromo merasakan pemeratan pembangunan sebab di era saat ini daerah wisata perlu diunggulkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan khususnya di daerah tujuan wisata.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena sebagaimana adanya atau *das sollen*. Tulisan ini merupakan penelitian murni yang beranjak dari rasa ketertarikan adanya kesenjangan teoritis antara teori dua sektor yang di dalamnya memuat pertumbuhan ekonomi meretas ke bawah atau *trickle-down effects*. Lokasi

penelitian di mana data dikumpulkan berada di Desa Ngadisari yang mana Gunung Bromo menjadi destinasi wisata favorit. Tulisan ini bermaksud untuk mengenali dan memperoleh informasi pada karakteristik yang dimiliki oleh Gunung Bromo dalam menjelaskan terjadi tidaknya proses *trickle-down economics*. Penelitian ini melibatkan proses pengumpulan data yang dianalisis secara kualitatif yang mana peneliti dapat terlibat dalam menguji, merefleksikan terhadap persepsi dengan tujuan untuk mencapai pemahaman akan aktivitas manusia dan aktivitas sosial (Collis and Hussey, 2003). Secara metode, peneliti turun ke lapangan dan melakukan observasi langsung di Desa Ngadisari. Peneliti melakukan wawancara sebanyak 20 orang yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sehingga jawabannya dapat membantu peneliti untuk mendapat gambaran dan rumusan jawaban yang diinginkan. 100 orang tersebut terdiri atas sejumlah pemilik kios yang buka di Desa Ngadisari yang berinteraksi baik dengan wisatawan asing maupun wisatawan lokal. 100 orang tersebut juga terdiri dari beberapa pemuda yang bekerja di sektor kuliner dan penginapan yang berinteraksi baik dengan wisatawan asing maupun wisatawan lokal yang datang untuk menikmati pesona keindahan Gunung

Bromo maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang relevan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Globalisasi di bidang teknologi dan informasi kini telah memungkinkan orang untuk berkeinginan untuk melakukan perjalanan karena suatu tempat yang menarik (Czaika and Haas, 2014). Didukung moda transportasi yang lebih beragam dan akomodatif, orang lebih mudah berpindah tempat dalam waktu yang lebih singkat daripada yang dulu dapat dilakukan.

Berwisata merupakan salah satu bentuk perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain secara temporer (Czaika and Haas, 2014). Seringkali kita temukan semakin banyak orang mengunggah foto saat berkunjung ke suatu destinasi wisata tertentu. Hal ini menular pada orang lain di sekitarnya untuk melakukan hal serupa yang lazim kita kenal dengan “jalan-jalan”. Tak hanya jalan-jalan ke destinasi wisata domestik, bahkan lebih banyak orang jalan-jalan ke luar negeri. Fakta orang Indonesia gemar jalan-jalan sudah bukan rahasia umum lagi. Orang Indonesia tercatat menghabiskan 33 miliar rupiah. Hal itu dibuktikan dengan melesatnya jumlah pendapatan dari segmen online travel booking di sepanjang 2017. Dari data yang dilansir Statista, total pendapatan dari segmen online travel booking di Indonesia

hingga September 2017, mencapai USD 2.417 juta atau hampir Rp 33 miliar (Noor, 2017).

Menurut Sharpley dan Telfer (2002) pariwisata dapat menjadi alat efektif yang memacu peningkatan pendapatan, pekerjaan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah yang menyadari potensi wisata di wilayahnya dapat merancang perencanaan pembangunan di daerah. Pembangunan di daerah akan memicu konektivitas ke daerah tersebut (Nirwandar, 2011; Taufiqurrohman, 2014; Zaenuri, 2012). Akses jalan yang mudah, petunjuk jalan yang memadai, penerangan jalan yang memadai, didukung dengan tingkat keamanan akan meningkatkan kenyamanan wisatawan selama berkunjung. Hal ini perlu perencanaan strategis dan matang sehingga dapat terwujud (Sharpley and Telfer, 2002).

Dalam era globalisasi saat ini, sektor pariwisata merupakan industri terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Sektor pariwisata akan menjadi pendorong utama perekonomian dunia pada abad ke-21, dan menjadi salah satu industri yang mengglobal (Harimawan and Hj. Dra. Wahyu Hidayati, 2012; I and Prof. Mudrajad Kuncoro, 2016; Rahmayanti and M. Prayoga Permana, 2015, 2015; Suwardiman, 2016; Yee, 2017). Pariwisata telah memberikan devisa

yang cukup besar bagi berbagai negara (antaranews.com, 2017). Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau atau disebut juga sebagai nusantara atau negara maritim, telah menyadari pentingnya sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia dikarenakan pertumbuhan pariwisata Indonesia selalu di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pengeluaran-pengeluaran wisatawan dapat mendorong pendapatan penduduk setempat. Indikator peningkatan kualitas hidup dapat dilihat pada tingkat konektivitas baik transportasi maupun koneksi data, tingkat partisipasi masyarakat dalam perdagangan cinderamata khas daerah, serta tingkat komunikasi antara masyarakat dan wisatawan.

Kunjungan wisatawan baik asing maupun domestik merupakan berkah ekonomi bagi orang-orang yang tinggal di sekitar wilayah wisata tersebut. Dengan hadirnya konektivitas jalan yang memadai dan keamanan dan kenyamanan, maka warga lokal dapat segera memanfaatkan dengan membangun kios-kios. Kios-kios ini menyediakan kebutuhan yang dapat diperoleh dengan mudah oleh wisatawan dengan harga yang wajar. Perkembangan dan kemajuan wilayah terpencil dapat mendorong kenaikan taraf hidup dan taraf ekonomi wilayah yang menjadi tujuan wisata.

Harapannya, jika wisata di daerah didorong untuk maju sehingga banyak wisatawan berkunjung, maka perekonomian daerah setempat akan membaik dan daerah lokal akan tumbuh mengimbangi destinasi wisata terkenal lainnya seperti Bali, Manado, Nusa Dua, dan lainnya (Utama, 2006).

Sayangnya, pemerintah daerah tidak dapat menutup mata pada persoalan yang laten seputar pengembangan destinasi wisata dan daerah-daerah di sekitarnya. *Pertama*, tingkat daya saing tertinggi industri pariwisata Indonesia masih didominasi oleh kota-kota besar. Tingkat daya saing tertinggi pariwisata Indonesia masih didominasi oleh kota-kota besar. Kota Denpasar menduduki peringkat tertinggi dalam Indeks Pariwisata Indonesia. Dari rentang skala indeks 0 hingga 5, kota ini mendapat skor 3,81. Aspek lingkungan pendukung bisnis, tata kelola dan infrastruktur menjadi penopang utama keunggulannya. Kota Batam menduduki peringkat berikutnya dengan skor 3,73. Padahal masih banyak destinasi wisata yang tidak kalah menarik yang lokasinya justru jauh dari pemukiman penduduk. Sekitar 285 (57%) kabupaten/kota berada di bawah skor rata-rata nasional (Suwardiman, 2016). Akibatnya, jumlah wisatawan asing maupun local yang berkunjung ke Gunung Bromo masih jauh dari signifikan.

Kedua, terdapat persoalan klasik mewarnai pengalaman wisatawan selama berkunjung. Yakni kebutuhan di sekitar atau dekat destinasi wisata selalu dijual dengan harga yang tidak wajar. Jika kebutuhan ini dijual dengan harga di atas harga pasar, maka mustahil wisatawan akan kembali membeli produk yang dijual. Akibatnya sektor penjualan makanan dan minuman dan kebutuhan ringan lainnya akan lesu.

Ketiga, investasi yang ditanamkan di daerah Desa Ngadisari dan sekitarnya, berdasarkan temuan, justru berasal dari warga yang tinggal di perkotaan dan kota besar seperti Surabaya dan Jakarta. Hotel-hotel dan penginapan yang dibangun di sekitar Desa Ngadisari merupakan sebagian milik warga Surabaya, Jakarta dan Malang. Umumnya pemilik ini merupakan golongan dari orang-orang yang sudah berada atau masyarakat menengah ke atas. Warga Desa Ngadisari yang umumnya merupakan masyarakat bawah mereka memanfaatkan peluang ekonomi dengan membuka kios-kios makanan, minuman, dan rokok. Sayangnya kios yang dibuka ini pun kebanyakan pembelinya adalah warga yang kebetulan singgah dari kegiatan sehari-hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tipe masyarakat ekonomi di Desa Ngadisari adalah

masyarakat ekonomi tradisional yang subsisten.

Keempat, destinasi wisata Gunung Bromo belum menjadi destinasi wisata favorit wisatawan karena konektivitas yang masih jauh dari signifikan. Pesona Gunung Bromo masih kalah dengan pesona pantai dan budaya di Kota Denpasar dan sekitarnya. Konektivitas yang kalah jauh dengan konektivitas Denpasar menjadi persoalan. Tidak dapat dipungkiri, jalan yang mengarah semakin dekat ke Gunung Bromo hanya dapat dilalui oleh jalur satu mobil saja. Akibatnya, jika kebetulan terdapat mobil yang berpapasan, maka salah satu mobil harus mengalah dan siap menyentuh bebatuan. Persoalannya, ketika pada acara-acara tertentu misalnya ketika Jazz Gunung digelar, maka bisa dibayangkan kepadatan dan kemacetan sepanjang jalur ini.

Kelima, konektivitas yang tidak berkembang sama sekali atau sedikit sekali mendapat kemajuan berpotensi melanggengkan kekuasaan oligopoli atas destinasi wisata. Hampir sepuluh tahun jalur kendaraan umum menuju Gunung Bromo seolah tidak mendapat perhatian pemerintah daerah malah terdapat kesan pembiaran. Betapa tidak, hampir selama sepuluh tahun tidak ada pelebaran jalan dan minim sekali kehadiran aparat keamanan di sekitar jalur ini. Padahal jalur ini jika pada

malam hari termasuk pada jalur yang rawan kriminalitas. Sehingga tidak heran muncul anggapan bahwa keterpurukan konektivitas sengaja dimanfaatkan untuk melanggengkan bisnis persewaan mobil *hardtop*. Jalanan yang bebatuan, kurang aman, rawan kriminalitas, dan rawan aspek keamanan lainnya menyebabkan hanya orang tertentu yang sudah kenal “medan” yang dapat melaluinya tanpa masalah. Didukung dengan spesifikasi kendaraan, maka kendaraan *hardtop* dijadikan pilihan terbaik untuk melalui medan uji nyali tersebut. Ini yang menjadikan wisatawan asing dan lokal seolah diarahkan untuk menyewa *hardtop* daripada berkendara sendiri di kawasan wisata Gunung Bromo. Inilah yang menjadi kendala kenapa destinasi wisata Gunung Bromo belum menjadi destinasi wisata menarik dari sisi konektivitas berbeda dengan Kota Denpasar Bali, Kota Batu Malang, dan beberapa kota lainnya dengan peluang wisata yang sama.

DISKUSI

Sebagaimana yang telah disampaikan pada intisari di atas maka dari penelitian yang penulis lakukan ditemukan gambaran *trickle-down economics* di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Probolinggo. Desa Ngadisari yang membuka usaha untuk merespon perkembangan pariwisata Gunung Bromo ini tidak hanya warga lokal

akan tetapi dari berbagai daerah diluar Kecamatan Sukapura. Menurut pendekatan *trickle-down economics*, menjelaskan bahwa kemajuan yang dipromosikan sektor swasta akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata.

Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya, sebagaimana wawancara yang telah dilakukan, ditemukan bahwa yang memanfaatkan lapangan kerja dari peluang usaha di Desa Ngadisari ternyata bukan penduduk asli Desa Ngadisari, melainkan dari daerah lain di luar Kecamatan Sukapura, sedangkan masyarakat lokal lebih memilih membuka usaha sendiri dan tidak bekerja pada investor pemilik hotel, dari permasalahan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa *trickle-down economics* tidak berjalan maksimal di Desa Ngadisari.

Meskipun *trickle-down economics* tidak berjalan optimal karena sejumlah persoalan laten. Bukan berarti tidak ada yang memanfaatkan dan berkah ekonomi dari adanya destinasi wisata tersebut. Justru dengan adanya

destinasi wisata Gunung Bromo yang berada di wilayah Ngadisari tersebut menjadi berkah ekonomi tersendiri bagi masyarakatnya, karena begitu banyak peluang usaha yang bisa ditawarkan kepada wisatawan yang tidak hanya lingkup domestik melainkan lingkup mancanegara mulai dari menjual pernak pernik, makanan khas, kuda, *jeep*, kaos, hotel, penginapan dan lain-lain. Hal ini membuat perekonomian masyarakat sedikit demi sedikit meningkat, ditambah lagi masyarakat tetap melakukan aktivitas ekonomi atau mata pencaharian utamanya yaitu bercocok tanam. Pertanian memang menjadi mata pencaharian utama masyarakat desa Ngadisari, mengingat kondisi geografis desa Ngadisari sangat cocok untuk melakukan aktivitas pertanian, sehingga banyak masyarakat lokal yang tetap bertani meskipun mencari tambahan perekonomian dengan memanfaatkan Destinasi Wisata Gunung Bromo.

Dari gambaran *trickle-down economics* di desa Ngadisari di atas maka perlu adanya sikap terbuka masyarakat terhadap segala perkembangan yang nantinya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, di mana masyarakat seharusnya memanfaatkan investor yang membuka peluang usaha dimanfaatkan keberadaannya untuk menjadi peluang dan kesempatan kerja

bagi masyarakat lokal desa Ngadisari agar pemerataan pembangunan dapat terwujud di kalangan masyarakat miskin. Sikap terbuka ini dapat diwujudkan dengan mengizinkan kehadiran pemerintah daerah untuk memberi kemajuan di bidang konektivitas jalan dan prasarana umum lainnya, sekaligus kehadiran aparat hukum untuk menjamin keamanan dari dan ke destinasi wisata tersebut.

KESIMPULAN

Adanya perkembangan destinasi wisata Gunung Bromo menjadikan perubahan ekonomi suatu hal yang tidak bisa dihindari, akibat dari investasi pihak swasta maupun usaha dari masyarakat untuk memperbaiki perekonomian keluarganya, masyarakat kemudian menemukan celah yang dapat meningkatkan pendapatannya sehari-hari begitupun masyarakat di desa Ngadisari meskipun tidak maksimal. Berdasarkan temuan peneliti, peneliti dapat menarik simpulan bahwa gambaran *trickle-down economics* di Desa Ngadisari ialah peluang usaha destinasi wisata Gunung Bromo yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Desa Ngadisari walaupun hanya sebagian kecil yang memanfaatkan investor dari luar Desa Ngadisari namun belum menyumbang pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Desa Ngadisari sehingga dapat dikatakan bahwa

pendekatan trickle- down economics
di Desa Ngadisari tidak maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, F. (1982) *Reaganomics: Rhetoric Vs. Reality*, Boston: South End Press.
- Aditya H, Tony. (2016) *Diplomasi Pariwisata ASEAN di Pasar Global*, Tesis Pascasarjana, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Antaranews. (2017) *BI: Sektor Pariwisata Berpotensi Dorong Pertumbuhan Ekonomi* (Online). Tersedia di: <https://www.antaranews.com/berita/658816/bi-sektor-pariwisata-berpotensi-dorong-pertumbuhan-ekonomi> (Diakses: 7 Oktober 2018).
- Arestis, P., Baddeley & M., McCombie, J.S.L. (Eds). (2007) *Economic Growth: New Directions in Theory and Policy*, United Kingdom: Edward Elgar Publishing.
- Bartlett, Bruce. (2009) *The New American Economy: The Failure of Reaganomics and a New Way Forward*, (1st Edition), New York: Palgrave MacMillan.
- Buchanan, J.M. (1989) *Reaganomics and After*, London: Institute of Economic Affairs.
- Cutler, D., Katz, L. (1991) "Macroeconomic Performance and the Disadvantaged", *Brookings Papers on Economic Activity*, Vol. 2, pp. 1-74.
- Czaika, M., Haas, H. de. (2014) "The Globalization of Migration: Has the World Become More Migratory?", *International Migration Review*, Vol. 48, pp. 283-323. <https://doi.org/10.1111/imre.12095> (Diakses: 7 Februari 2018).
- GuideMeSingapore. (2016) *Singapore Remains a Central Hub For Company Formations Despite Drop In Overall Q4 Figures* (Online). Tersedia di: <https://www.guidemesingapore.com/in-the-news/2016/2016---singapore-remains-a-central-hub-for-company-formations-despite-drop-in-overall-q4-figures> (Diakses: 19 Agustus 2018).
- Harimawan, Rosario Guntur. (2012) *Analisis Keunggulan Komparatif Sektor Pariwisata Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN)*, Tesis Pascasarjana, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Henderson, David R. (1992) *Concise Encyclopedia of Economics*, United States: Liberty Fund Inc.
- Lehmans, D.J. (2015) *Understanding Trickle-Down Economics*, CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Nirwandar, S. (2011) *Pembangunan Sektor Pariwisata di Era Otonomi Daerah* (Online). Tersedia di: http://kemenpar.go.id/userfiles/file/440_1257-PEMBANGUNANSEKTORPARIWISATA1.pdf (Diakses 21 Agustus 2018).
- Niskanen, W.A. (1988) *Reaganomics: An Insider's Account of the Policies and the People*, New York: Oxford University Press.
- Nizar, M.A. (2011) *Pengaruh Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia* (Online). Tersedia di: https://www.researchgate.net/publication/279412370_PENGARUH_PARIWISATA_TERHADAP_PERTUMBUHAN_EKONOMI_DI_INDONESIA (Diakses: 28 Agustus 2018).
- Noor, A.R. (2017) *Orang Indonesia Doyan Jalan-jalan, Setahun Habiskan Rp 33 Miliar* (Online). Tersedia di: <https://inet.detik.com/business/d-3778751/orang-indonesia-doyan-jalan-jalan-setahun-habiskan-rp-33-miliar> (Diakses: 7 Februari 2018).
- Okun, A. (1973) "Upward Mobility in a High-Pressure Economy", *Brookings Papers on Economic Activity*, Vol.1(1), pp. 207-252.

- Permadi, D. (2012) *Runtuhnya Neo-Liberalisme Global: Analisis Ekonomi Politik tentang Kemunduran Neo-liberalisme dan Peluang Kebangkitan Neo-Keynesianisme*, Yogyakarta: Institute of International Studies.
- Persky, J., Felzenshtain, D., Carlson, V. (2004) *Does "trickle Down" Work?: Economic Development Strategies and Job Chains in Local Labor Markets*, Westledge Avenue Kalamazoo: Upjohn Institute Press.
- Pultar, G. (Ed). (2014) *Imagined Identities: Identity Formation in the Age of Globalization*, United States: Syracuse University Press.
- Rahmayanti, Erni. (2015) *Daya Saing Pariwisata Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Rokhmah, Alifah. (2016) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pariwisata Internasional Di Asean-5, 1999-2014*, Tesis Pascasarjana, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Seip, J., Harper, D.W. (2016) *The Trickle-Down Delusion: How Republican Upward Redistribution of Economic and Political Power Undermines Our Economy, Democracy, Institutions and Health—and a Liberal Response*, United States: University Press of America.
- Selowsky, M. (1979) 'Balancing Trickle Down and Basic Needs Strategies: Income Distribution Issues in Large Middle-income Countries with Special Reference to Latin America', *Staff Working Paper*, World Bank.
- Sharpley, R. & Telfer, D.J. (Eds). (2002) *Tourism and Development: Concepts and Issues*. United Kingdom: Channel View Publications.
- Sowell, T. (2013) *Trickle Down Theory and "Tax Cuts for the Rich*, Stanford: Hoover Institute Press.
- Staff, B.S.G. (2011) *Reaganomics in Plain and Simple English: Book Caps Study Guide*, Book Caps Study Guides.
- Suwardiman. (2016) *Memetakan Daya Saing Industri Pariwisata Daerah*.
- Taufiqurrohman, M. (2014) "Strategi Pengembangan Pariwisata Serta Kontribusinya Pada Penerimaan Retribusi Kota Pekalongan", *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 3.
- Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2015) *Economic Development*. United States: Pearson.
- Utama, M.S. (2006) *Pengaruh Perkembangan Pariwisata Terhadap kinerja Perekonomian Dan Perubahan Struktur ekonomi serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali*, Disertasi, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Wartakota. (2017) *Wah, Seoul Sediakan Informasi Wisata dalam Bahasa Indonesia* (Online). Tersedia di: <http://wartakota.tribunnews.com/2017/05/04/wah-seoul-sediakan-informasi-wisata-dalam-bahasa-indonesia> (Diakses: 8 Agustus 2018).
- Yoety, O.A. (2008) *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Aplikasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Yoety, O.A. (1999) *Industri Pariwisata dan Peluang Kesempatan Kerja*. Pertja.
- Zaenuri, M. (2012) *Perencanaan Strategis Kepariwisata Daerah Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: e-Gov Publishing.